

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menjadi negara yang dipimpin oleh pemerintah ataupun presiden. Adanya pemerintah pusat yang mengatur keseluruhan negara dan pemerintah daerah yang mengatur setiap daerah di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di setiap sektor bidangnya, salah satunya sektor ekonomi. Sektor ekonomi tersebut bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Adanya kewenangan yang diberikan melalui masyarakat dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaannya. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah :

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah melakukan tugas dan kebijakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku agar dalam melakukan tugasnya pemerintah daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah mempunyai kuasa penuh untuk dapat mengelola daerahnya dan dapat menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat ataupun masyarakat pusat. Kinerja yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan dan dapat dijadikan gambaran mengenai

sebuah pencapaian, Kinerja itu sendiri menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

“Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.”

Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan dan kewajiban yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang ada serta mempunyai tujuan ataupun patokan yang menjadi dasar dalam bekerja. Kewenangan daerah pada dasarnya merupakan bagian amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang menyatakan tentang penyerahan kewenangan terkait pengelolaan keuangan kepada daerah, sehingga timbul tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai organisasi publik guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta taat kepada peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya pemerintah masih belum sepenuhnya memaksimalkan wewenang yang diberikan ataupun tanggung jawab atas daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil atau nilai akhir yang didapat oleh pemerintah daerah dari kinerja yang sudah dijalani serta berita-berita yang memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah tersebut. Permasalahan tersebut terjadi di lingkungan sector publik, meskipun sudah ada teguran atau kritik baik dari masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Masih banyak pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang mengalami permasalahan ataupun ketidaksesuaian.

Aparat pemerintah yang seharusnya memiliki wewenang yang baik dalam mengurus dan mengelola daerahnya tetapi tidak berjalan dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, salah satunya adalah tindakan kecurangan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, dengan menggunakan anggaran daerah demi kepentingan pribadi. Adanya peran kepala daerah yang seharusnya memiliki peran serta pengaruh penuh untuk dapat mengelola dan membangun daerahnya tetapi justru ikut dalam kecurangan serta ketidakpatuhan. Kondisi ini dapat didiartikan juga penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah daerah. Wewenang dalam penggunaannya dapat sebagai suatu kekuasaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dalam fungsi dan kegunaannya pada pengendalian dan pengaturan pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika suatu instansi atau aparat pemerintahan menggunakan wewenangnya dengan maksud yang menyimpang dari wewenang yang diberikan sebelumnya (Efendi dan Poernom, 2017)

Tindakan penyalahgunaan wewenang seperti halnya korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor pada kasus tahun 2019 yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Bogor yaitu adanya pemotongan dana kegiatan SKPD serta penerimaan gratifikasi guna melancarkan asset tanah yang ada di Kabupaten Bogor. Tujuan dari pemotongan dana tersebut yaitu digunakan sebagai operasional oleh Bupati serta untuk kampanye kegiatan pencalonan kembali. Sementara gratifikasi berupa asset tanah tersebut diduga diberikan kepada pemilik tanah guna adanya proses pelolosan perizinan terkait pembangunan pondok pesantren. Sebagai Bupati Kabupaten Bogor sudah selayaknya memiliki wewenang serta kendali lebih. Tetapi

wewenang atau tindakan kendali yang digunakan tersebut terdapat penyalahgunaan dan kecurangan. Adanya permasalahan tersebut memang tidak selayaknya dilakukan oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah sudah selayaknya bekerja secara ketentuan yang ada agar tercapainya suatu tujuan. Tentu sikap transparansi diperlukan agar masyarakat juga dapat menilai suatu wewenang dan kinerja pemerintah sudah sesuai atau belum. Permasalahan yang ada dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor luar pemerintah daerah maupun faktor dalam.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa faktor-faktor yang ada antara lain budaya organisasi, pusat kendali dan pengendalian internal. Variabel independent yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi pasti ada dan selalu terjadi, serta dimiliki setiap kelompok atau organisasi yang memiliki sifat-sifat tersendiri itu sendiri. Budaya organisasi memiliki peran penting yang ada di dalam kelompok itu sendiri yang dapat menunjang untuk mencapai suatu tujuan kelompok tersebut. Budaya organisasi yang kurang kuat maka dapat diindikasikan adanya pelemahan atau permasalahan yang ada pada sumber-sumber di dalam kelompok tersebut. Dengan adanya komponen tersebut, maka budaya organisasi juga dapat mempengaruhi wewenang pada pemerintah daerah.

Selain budaya organisasi, juga terdapat pusat kendali terkait kepribadian manusia. Menurut Rotler (1986), pusat kendali tersebut terdapat pada orang-orang yang ada di organisasi, dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu, pusat kendali pasti juga terdapat pada pemerintah daerah yang memiliki wewenang menyeluruh dalam lingkungan pemerintah serta daerah yang diatur.

Pusat kendali bisa saja berpengaruh terhadap penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah. Adanya perubahan gaya kepemimpinan yang berubah dalam suatu kendali sehingga berubah pula motivasi pada pekerjaan tersebut.

Adapula pengendalian yang ada dalam organisasi tersebut yaitu pengendalian internal Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013), Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini: efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdapat pada setiap kelompok yang menjalankan suatu tujuan tertentu.

Hal tersebut didukung pula dengan Penelitian tentang budaya organisasi, pusat kendali dan pengendalian internal sudah banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya dan memperoleh hasil yang beragam. Penelitian Wahyuni (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif budaya organisasi dan pusat kendali terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dapat diartikan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memicu pegawai atau aparat pemerintah untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi terkait perihal profesionalisme, serta integritas di setiap individu tersebut. Adanya pusat kendali yang tinggi maka akan mendorong kinerja positif aparat pemerintah daerah yang semakin meningkat secara kualitas kinerja dan wewenangnya. Dalam penelitian Firdaus Ftriati (2015) penyalahgunaan wewenang biasa dilakukan oleh pihak yang lebih mendominasi serta mengatur suatu kekuasaan.

Lalu pada penelitian Nurfitriah Indah (2015) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang pada tindakan korupsi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kepribadian seseorang sedangkan faktor eksternal merupakan faktor ekonomi, agama jabatan. Sebagai pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada rakyatnya. Penelitian Saputra (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian intern pemerintah belum mewujudkan peningkatan efektivitas dan tindak lanjut pengawasan dalam penyalahgunaan wewenang. Penelitian Endrawati (2017) menunjukkan bahwa ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tindakan korupsi penyalahgunaan wewenang. Serta penelitian Purwoko (2012) menunjukkan bahwa faktor kepentingan pribadi dan kurangnya transparansi berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menguji, dengan cara menggabungkan beberapa variabel independent yang ada pada penelitian sebelumnya telah diteliti secara terpisah dan memodifikasi variabel pada penelitian sebelumnya yaitu Penyalahgunaan wewenang. Dan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemimpin Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bogor yang terlihat semena-mena dalam tanggung jawab/wewenangnya. Serta adanya ketertarikan terkait wewenang pemerintah yang belum sepenuhnya sempurna sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan budaya organisasi, pusat kendali, dan pengendalian internal yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan wewenang aparat Pemerintah

Kabupaten Bogor dan apakah penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir oleh beberapa faktor.

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bogor, alasan dipilihnya objek tersebut karena Kabupaten Bogor dengan informasi yang didapat melalui *website* resmi dan berita, terkait adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati serta SKPD Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dan pada objek tersebut belum ada penelitian yang membahas penyalahgunaan wewenang. Tentu permasalahan tersebut merupakan bagian dari permasalahan yang ada pada pemerintah daerah terkait wewenang yang dimiliki dengan adanya beberapa hal yang dapat dipengaruhi. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Budaya Organisasi, Pusat Kendali Dan Pengendalian Internal Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor”**

1.2. Rumusan Masalah

Melihat kelanjutan berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan mengenai penyalahgunaan wewenang yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah budaya organisasi dapat menurunkan niat untuk penyalahgunaan wewenang aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor?
2. Apakah pusat kendali dapat menurunkan niat pada penyalahgunaan wewenang aparat Pemerintah Kabupaten Bogor ?

3. Apakah pengendalian internal dapat menurunkan niat penyalahgunaan wewenang aparat Pemerintah Kabupaten Bogor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh budaya organisasi , pusat kendali dan pengendalian internal terhadap penyalahgunaan wewenang. Serta mengetahui faktor-faktor apa yang dapat meminimalisir/mengurangi adanya pengaruh penyalahgunaan wewenang dengan objek di Kabupaten Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi penulis selanjutnya tentang pengaruh budaya organisasi, pusat kendali dan pengendalian internal terhadap penyalahgunaan wewenang aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. penelitian ini dapat digunakan oleh penulis selanjutnya sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah dapat berkurang atau dapat diminimalisir.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan dan

mengawasi wewenang serta kinerja pemerintah daerah di kabupaten tersebut.

1.5. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar terarah atau lebih menjurusnya penelitian dan memudahkan pembahasan untuk tercapainya tujuan. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Ruang lingkup tersebut yaitu informasi seputar penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah
2. Informasi tersebut antara lain masalah kinerja pemerintah daerah serta pengaruh dari budaya organisasi, pusat kendali, pengendalian internal yang berhubungan dengan wewenang pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara umum bagian bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menuliskan secara rinci jenis penelitian rancangan penelitian, objek penelitian yang akan dilakukan, peneliti juga menuliskan sampel seperti apa yang digunakan, peneliti juga menuliskan prosedur pengambilan data, serta model dan teknis analisis data.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, analisis dan hasil penelitian, serta pembahasan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran yang perlu disampaikan.